



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN

2026



TIM PENYUSUN

Pengarah

Frista Yorhanita

Penyusun

Ketua : Ermin Nurman

Anggota :

1. Khusnul Khotimah
2. Ririn Ambarwati
3. Mariyatul Qibtiyah
4. Aksa Setia Mukti
5. R. Rizki Andhhitya Yunanto
6. Yuli Nugroho
7. Nurdiansyah

Kontributor :

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Sumberdaya Kelautan
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan I Tahun 2026 dalam meningkatkan kawasan sentra ekonomi garam, revitalisasi lahan garam, usaha kelautan berkelanjutan serta meningkatkan perizinan berusaha sumber daya kelautan.

Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Direktorat Sumberdaya Kelautan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2026

Direktur Sumber Daya Kelautan



F. H. H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan terdiri atas 14 indikator kinerja kegiatan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 110,55 (Istimewa).

Pada tahun 2026 alokasi Direktorat Sumberdaya Kelautan sebesar Rp.1.202.800.000.000 yang terdiri atas 2 komponen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Rp.1.201.500.000.000) dan Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Rp.1.300.000.000).

Sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada Triwulan I ini terdapat 2 target capaian indikator kegiatan, yaitu :

1. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 81% dan capaian 95,24% sebesar 117,6%;
2. IKK 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen) dengan target 1 Dokumen, dan capaian 1 Dokumen atau tercapai sebesar 100%;

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan terdapat beberapa tantangan, antara lain: 1) kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) lahan garam ekstensifikasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi *clean and clear*; 3) penyelesaian status BMKT ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya), serta 4) minimnya pemahaman pelaku usaha terkait perijinan berusaha, Upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan antara lain: meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun *stakeholder* dalam mewujudkan target swasembada garam, penyelesaian status BMKT ODCB, serta meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan BMKT.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	2
1.3. Isu Strategis Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN	5
2.1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan	5
2.3. Perencanaan kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.1.1. IKK 1 Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	11
3.1.2. IKK 2 Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	12
3.1.3. IKK 2 Luas Lahan Garam yang Direvitalisasi (Ha)	13
3.1.4. IKK 4 Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)	16
3.1.5. IKK 5 Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)	18
3.1.6. IKK 6 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	23
3.1.7. IKK 7 Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	28
3.1.8. IKK 8 Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)	31
3.1.9. IKK 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)	33
3.1.10. IKK 10 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)	35
3.1.11. IKK 11 Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)	37
3.1.12. IKK 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	39
3.1.13. IKM 13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	40
3.1.14. IKM 14. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	45
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kegiatan triwulan 1 tahun 2026.....	10
Tabel 2. Capaian IKK Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	11
Tabel 3. Capaian IKK Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang).....	12
Tabel 4. Capaian IKK Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang).....	14
Tabel 5. Capaian IKK Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)	15
Tabel 6. Capaian IKK Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif).....	16
Tabel 7. Capaian IKK Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m3)	18
Tabel 8. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	24
Tabel 9. Capaian IKK Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	29
Tabel 10. Capaian IKK Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%) ..	32
Tabel 11. Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%).....	34
Tabel 12. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)	36
Tabel 13. Capaian IKK Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)	38
Tabel 14. Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	39
Tabel 15. Capaian IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks).....	44
Tabel 16. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	47
Tabel 17. Capaian kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan Tahun 2026	54
Tabel 18. Tindak lanjut rekomendasi Tahun 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan	2
Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Baru	7
Gambar 3. Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan 2026.....	9
Gambar 4. Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	21
Gambar 5. Pembahasan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	23
Gambar 6. Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023	26
Gambar 7. Penjajakan Kerja Sama Galeri BMKT dengan Galeri Indonesia Kaya	27
Gambar 8. Pertemuan Identifikasi Lanjutan dan Penjajakan Kerja Sama Identifikasi BMKT dengan BRIN	28
Gambar 9. Bimbingan teknis pengolahan produk berbahan albumin ikan gabus	31
Gambar 10. Dokumen Pembahasan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	48
Gambar 11. Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan	49
Gambar 12. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN.....	49
Gambar 13. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026	51

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

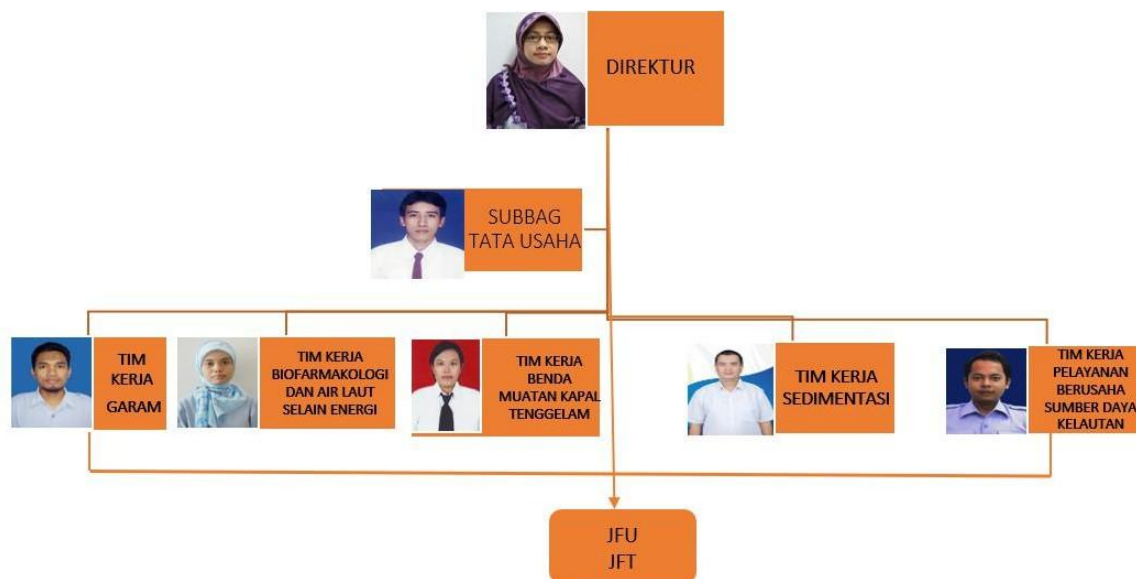
Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut,

- pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sumber Daya Kelautan ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan

Direktorat Sumberdaya Kelautan didukung oleh 52 orang pegawai, yang terdiri dari 20 orang pegawai wanita, dan 32 orang pegawai laki-laki. Berdasarkan status kepegawaiannya,

pegawai didominasi oleh ASN sebanyak 32 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 4 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan status jabatan fungsionalnya terdapat 2 jabatan fungsional di Direktorat Sumberdaya Kelautan yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) sebanyak 6 orang pegawai dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) sebanyak 26 orang pegawai. Untuk JFT PELP terdiri atas 1 orang ahli madya, 2 orang ahli muda dan 3 orang ahli pertama. Sementara untuk JFT APJK terdiri atas 1 orang ahli utama, 8 orang ahli madya, 11 orang ahli muda, dan 6 orang ahli pertama.

1.3. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang menjadi fokus Direktorat Sumberdaya antara lain :

1. Kebutuhan garam dalam negeri yang meningkat setiap tahun. Seperti yang diketahui rata-rata kebutuhan garam nasional berada di kisaran 4,6 – 4,9 juta ton dengan rata-rata importasi diatas 2,6 juta ton atau berkisar lebih dari 50% merupakan hasil impor. Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mengingat potensi sumber daya kelautan Indonesia, pengembangan garam di Indonesia masih dapat dioptimalkan. Untuk itu, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pemerintah berupaya untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam;
2. Pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dikelola Direktorat Sumberdaya Kelautan merupakan bentuk komitmennya dalam mengelola asset negara yang bernilai ekonomi, budaya dan ekologis. Sesuai Peraturan Presiden No 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT mencakup 2 kegiatan utama yaitu pengangkatan dan pemanfaatan *in situ*. Pengelolaan ini menjadi penting dikarenakan dengan pengelolaan ini diharapkan dapat memperkuat program ekonomi biru;
3. Pemanfaatan biota laut Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi sumber bahan bioaktif. Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutrasetikal, dan kosmetik.

Dengan pemanfaatan biota laut sebagai biofarmakologi diharapkan mampu mendukung program ekonomi biru;

4. Sedimentasi merupakan proses alamiah yang terjadi dimana partikel padat tersuspensi dalam cairan mengendap karena gravitasi sehingga membentuk lapisan sedimen di dasar. Sedimentasi di laut seringkali terjadi akibat kelanjutan erosi yang membawa material kehilangan momentum dan mengendap. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Selain itu, pemanfaatan hasil sedimen di laut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan tersebut.

BAB II. PERENCANAAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan Direktorat Sumber Daya Kelautan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

Visi Direktorat Sumber Daya Kelautan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumberdaya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi

hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sistem utama pembangunan nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor. Ekologi sebagai panglima

2. Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan;

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjaab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis, sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan dan perikanan Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- c. Integratif, melalui sinergi dan integrasi antara proogram dan anggaran lintas sektor; dan
- d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Empat pendekatan pembangunan ekonomi biru dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Baru

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, maka sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama: Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)
2. Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya kompetensi petambak garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)
3. Sasaran Kegiatan Ketiga: Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)
4. Sasaran Kegiatan Keempat: Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)

5. Sasaran Kegiatan Kelima: Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)
 - b. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)
 - c. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)
6. Sasaran Kegiatan Keenam : Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)
7. Sasaran Kegiatan Ketujuh : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)
 - c. Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)
 - d. Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)
 - e. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)
 - f. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

2.3. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2026.

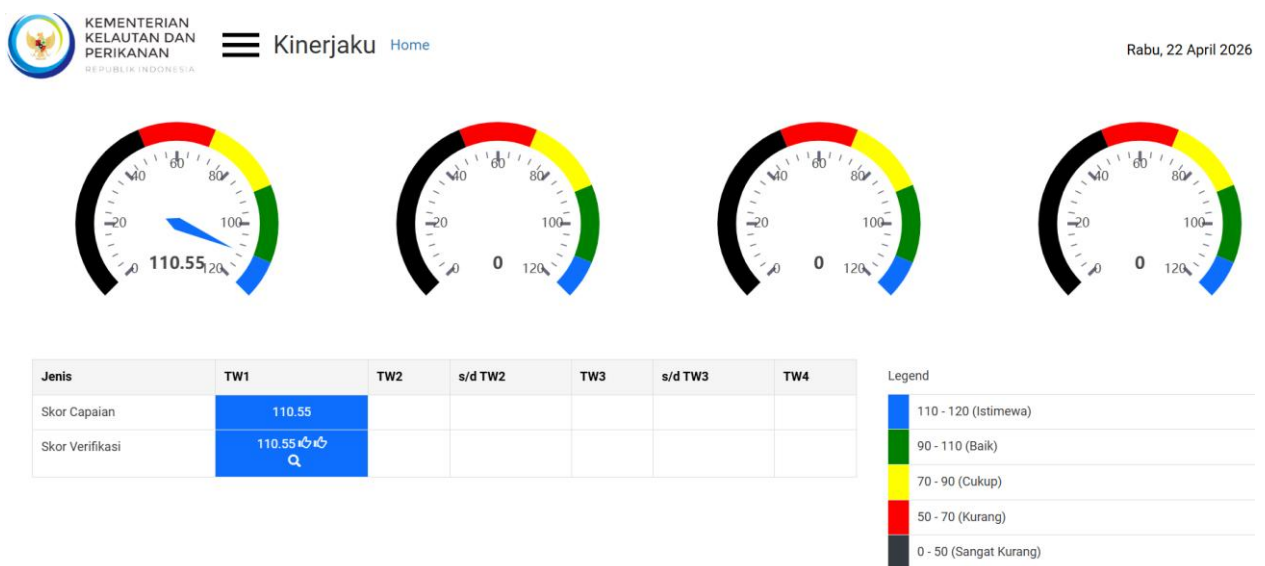
Indikator dan Target Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan. Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan disusun pada 26 Januari 2026 dengan anggaran senilai Rp. 1.202.800.000,- dengan 7 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Seperti ditampilkan pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan 1 tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2026 Triwulan 1 adalah 110,55 (Istimewa) pada aplikasi kinerjaku. Nilai pencapaian kinerja organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan tahun 2026 ditampilkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 3. Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan 2026

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kegiatan triwulan 1 tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	CAPAIAN TW I	%
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam	1.	Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	-	-	-
2.	Meningkatnya kompetensi petambak garam	2.	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	-	-	-
3.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	3.	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)	-	-	-
4.	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	4.	Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)	-	-	-
5.	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	5.	Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)	-	-	-
		6.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	-	-	-
		7.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	-	-	-
6.	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	8.	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)	9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)	81	95,24	117,6%
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)	-	-	-

		11.	Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)	-	-	-
		12.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	1	1	100%
		13.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)	-	-	-
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	-	-	-

3.1.1. IKK 1 Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)

Korporasi petambak garam yang dikembangkan adalah model pengelolaan usaha garam dimana petambak garam petambak garam tidak lagi bekerja secara individu, tetapi dihimpun dalam satu organisasi usaha bersama—biasanya berbentuk koperasi atau badan usaha—agar lebih kuat dari sisi produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Ciri utama korporasi petambak garam sebagai berikut :

1. Terorganisir;
2. Terintegrasi;
3. Skala lebih besar;
4. Akses lebih luas;
5. Manajemen lebih profesional;

Teknik Menghitung:

Menjumlahkan seluruh kelembagaan korporasi petambak garam yang difasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya.

$$\sum KPG = KPG(1) + KPG(2) + \dots KPG(n)$$

$\sum KPG$: Jumlah kelembagaan korporasi petambak garam yang di fasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya

$KPG_{(n)}$: Kelembagaan petambak garam yang dibina kapasitas kelembagaannya

Tabel 2. Capaian IKK Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)

SK-1	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam							
IKK - 1	Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	3	18	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat

tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
-
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
1. Workshop Koperasi Garam

3.1.2. IKK 2 Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)

Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya adalah petambak yang ditingkatkan kemampuannya, pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memproduksi garam sesuai standar cara produksi yang baik.

Teknik Menghitung

Menjumlahkan seluruh petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya secara nasional melalui bimbingan teknis atau sertifikasi di bidang pergaraman.

Tabel 3. Capaian IKK Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)

SK-2	Meningkatnya kompetensi petambak garam							
IKK - 2	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	100	25	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

-

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Workshop Koperasi Garam

3.1.3. IKK 2 Luas Lahan Garam yang Direvitalisasi (Ha)

Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya adalah petambak yang ditingkatkan kemampuannya, pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memproduksi garam sesuai standar cara produksi yang baik.

Teknik Menghitung

Menjumlahkan seluruh petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya secara nasional melalui bimbingan teknis atau sertifikasi di bidang pergaraman.

Tabel 4. Capaian IKK Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)

SK-2	Meningkatnya kompetensi petambak garam							
IKK - 2	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	100	25	-

G. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

H. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

I. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

J. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

-

K. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 4) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 5) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 6) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

L. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1) Workshop Koperasi Garam

Lahan garam yang direvitalisasi adalah lahan garam yang dilakukan perlakuan atau kegiatan langsung maupun tidak langsung agar meningkat produktivitasnya.

Perlakuan langsung diantaranya pelapisan geomembrane dan perbaikan lahan (intensifikasi), termasuk pembukaan lahan garam baru (ekstensifikasi). Perlakuan tidak langsung diantaranya perbaikan terhadap saluran air yang mengalirkan air laut sebagai bahan baku pembuatan garam sehingga lahan-lahan garam di sekelilingnya dapat meningkat produksi garamnya (*long storage*).

Teknik Menghitung

Menjumlahkan luas lahan garam yang dibangun melalui penerapan teknologi evaporasi, pelapisan geomembran, dan pembukaan lahan baru serta luas lahan garam yang memperoleh manfaat akibat dilakukannya perbaikan saluran irigasi (*long storage*).

Tabel 5. Capaian IKK Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)

SK-3	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi							
IKK - 3	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	%Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	1500 Ha	30 Ha	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

F. Kegiatan Pendukung

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana kegiatan revitalisasi lahan garam tahun 2026

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Rapat persiapan pendataan produksi (penyusunan pedoman, kerangka sampel)
2. Survey identifikasi dan/atau verifikasi Bantuan pemerintah
3. Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi Bantuan Pemerintah

3.1.4. IKK 4 Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional adalah wilayah yang dikembangkan secara terencana sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi garam nasional yang terintegrasi, mulai dari kegiatan hulu (produksi garam rakyat/industri), antara pengolahan dan pemurnian hingga hilir (distribusi dan pemanfaatan industri) guna mendukung swasembada dan kemandirian garam nasional secara ekstensifikasi dan intensifikasi.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Teknik menghitung:

Menjumlahkan kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam

Tabel 6. Capaian IKK Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan

(kawasan) (kumulatif)

SK-4	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam							
IKK - 4	Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	1 kawasan	1 kawasan	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Belum terdapat capaian triwulan I Tahun 2026 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 2) Kegiatan Pendukung
1. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
- 1) Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah pada tanggal 22 Januari 2026
 - 2) Pembahasan Dokumen Perencanaan KSIGN pada tanggal 18 Februari 2026 dan 26 Februari 2026
 - 3) Rapat Verifikasi Tambak Garam Rote Ndao pada tanggal 27 Februari 2026
 - 4) Rapat Pembahasan Review Dokumen Pengadaan Pembangunan KSIGN pada 10 Maret 2026

- 5) Rapat Pembahasan Review Dokumen Pengadaan Pembangunan KSIGN pada dengan LKPP 26 Maret 2026

3.1.5. IKK 5 Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 7. Capaian IKK Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan							
IKK - 5	Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	1000 juta m ³	150 juta m ³	200%	-	-	500 Juta m ³	800 Juta m ³	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

- 1) Telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 2) Telah Terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 3) Telah disusun konsep Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 4) Akumulasi capaian volume pengelolaan hasil sedimentasi pada Triwulan I sejumlah 1.000 Juta m³.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Triwulan I Tahun 2026 ini lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini terlihat dari capaian dokumen kebijakan yang telah terbit.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah akumulasi capaian volume pengelolaan hasil sedimentasi pada Triwulan I sejumlah 1.000 Juta m³ yang sudah mencapai 117,65% dari akumulasi total volume pengelolaan hasil sedimentasi sejumlah 850 Juta m³ sesuai Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pengelolaan hasil sedimentasi di laut ditentukan oleh sejauh mana proses sedimentasi dapat dikendalikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya regulasi yang jelas, pemantauan rutin terhadap wilayah pesisir dan laut, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya, sedimentasi yang dikeruk dapat dimanfaatkan kembali untuk reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur pesisir, atau restorasi ekosistem seperti mangrove dan padang lamun, sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan laut.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Jika pengelolaan dilakukan secara bijak, maka kualitas perairan tetap terjaga, kerusakan habitat laut dapat diminimalkan, dan nelayan lokal tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu. Pendekatan berbasis data dan teknologi, seperti pemetaan sebaran sedimen dan pemodelan arus laut, juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pengelolaan hasil sedimentasi tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah

kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya penegakan regulasi. Banyak wilayah pesisir yang belum memiliki rencana tata ruang laut yang jelas, sehingga pemanfaatan hasil sedimentasi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sering kali minim, menyebabkan praktik ilegal atau tidak ramah lingkungan tetap berlangsung, yang dapat merusak habitat laut dan memicu konflik kepentingan antar pihak.

Kendala lainnya adalah terbatasnya data dan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan. Banyak daerah belum memiliki sistem pemantauan sedimen yang memadai, seperti sensor arus dan sedimentasi atau perangkat GIS (Geographic Information System) yang akurat. Hal ini membuat perencanaan pengambilan, pemanfaatan, dan pemantauan hasil sedimentasi menjadi tidak optimal. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan ekologis pengelolaan sedimentasi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan teknologi.

Untuk mengatasi kendala pengelolaan hasil sedimentasi di laut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai pemanfaatan dan pengawasan hasil sedimentasi. Pembentukan satuan tugas atau forum koordinasi antarlembaga dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperketat izin operasi, audit lingkungan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar pelaku usaha lebih disiplin dalam menjalankan aktivitasnya secara ramah lingkungan.

Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Investasi dalam sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit, drone, dan sensor laut dapat menyediakan data real-time yang membantu pengambilan keputusan lebih akurat. Pelatihan bagi aparatur pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal juga perlu digencarkan agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sedimentasi secara berkelanjutan. Kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sedimen yang dimanfaatkan sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungannya. Banyak program pemanfaatan yang masih berfokus pada pembuangan sedimen tanpa mempertimbangkan potensi pemanfaatannya, seperti untuk reklamasi, penguatan pantai, atau bahan baku konstruksi. Akibatnya, biaya operasional menjadi tinggi karena proses pengangkutan dan pembuangan dilakukan secara terpisah, sementara nilai ekonomi dari sedimen tidak dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi bisa dicapai jika sedimen dikategorikan sejak awal berdasarkan jenis dan kualitasnya, sehingga langsung diarahkan pada pemanfaatan yang sesuai.

Selain itu, efisiensi juga terkait erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi kelembagaan. Kurangnya tenaga ahli, minimnya teknologi pemantauan, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi sering kali menyebabkan pengelolaan berjalan tidak efektif dan boros anggaran. Implementasi teknologi seperti

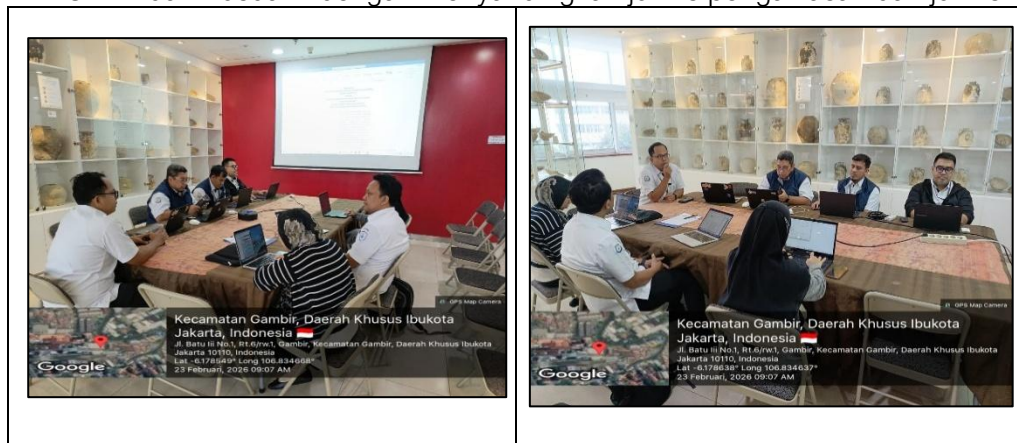
GIS dan sistem pemantauan laut seperti Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang bertujuan untuk menerapkan pemanfaatan teknologi digitalisasi sebagai media pelaporan atas kegiatan pengangkutan dan penempatan hasil sedimentasi laut sesuai dengan yang tertuang dalam Permen KP no.33 Tahun 2023 sebagaimana diubah dalam Permen KP no.3 Tahun 2025 dan terakhir dalam Permen KP no.6 Tahun 2026 dan automasi tugas pelayanan perizinan & monev terhadap kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang diamanahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (PP Nomor 26 Tahun 2023). Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya menghemat biaya dan tenaga, tetapi juga memastikan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2026 dengan dipimpin oleh Katimja Pelayanan Berusaha SDK Dit. SDK DJPK dan dihadiri oleh Perwakilan Pusdatin Setjen, Tim Sedimentasi SDK, Timja Pelayanan Berusaha SDK, dan perwakilan timja lainnya lingkup Dit SDK DJPK. Pembahasan pertemuan ini sebagai berikut:

- a. Masukan untuk mencantumkan indikator pengawasan pada juknis sesuai masukan pertemuan dengan Pusdatin di Semarang, tanggal 23 Desember 2025;
- b. Usulan untuk perizinan yang diperlukan untuk kapal termasuk Surat perizinan MMSI dari Ditjen Hubla Kemenhub dapat dilihat melalui OSS. Perlu dipastikan sudah bisa online atau masih offline;
- c. Perlunya ada nomor identitas untuk pekerja (KTP untuk WNI dan Paspor untuk WNA);
- d. Perlu didetailkan waktu input data dengan melakukan koordinasi bersama PSDKP;
- e. Petugas surveyor dari Lembaga yang terakreditasi ISO dan/ SNI;
- f. Perlu konsistensi kalimat dalam keseluruhan juknis ini sehingga ada keterkaitan;
- g. Tindak Lanjut pertemuan ini adalah mengadakan pertemuan lanjutan dengan PSDKP dan Pusdatin dengan menyandingkan juknis pengawasan dan juknis ini.



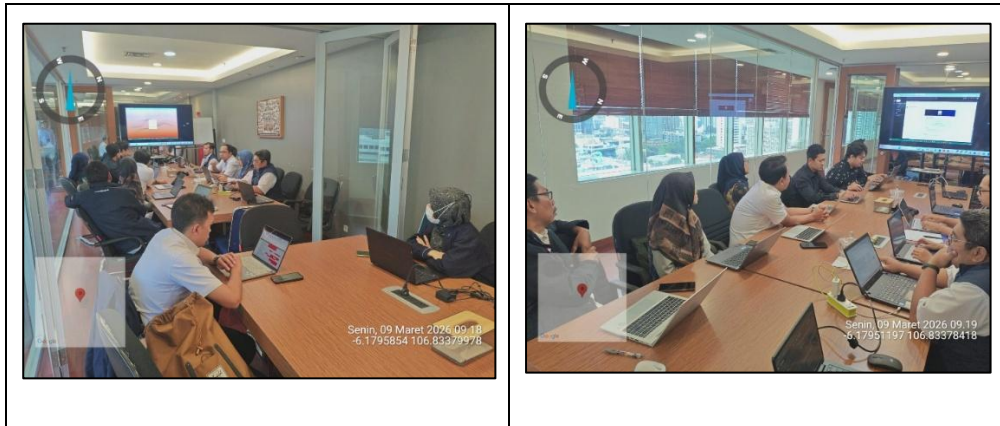
Gambar 4. Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

2. Pembahasan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2026 dengan dipimpin oleh Katimja Sedimentasi Dit. SDK DJPK dan dihadiri oleh Katimja Pelayanan Berusaha SDK, Direktorat SDK, Perwakilan Dit POA dan Dit PSDK, Ditjen PSDKP, Perwakilan Pusdatin Setjen beserta tim developer aplikasi, Tim Sedimentasi SDK, Timja Pelayanan Berusaha SDK, dan perwakilan timja lainnya lingkup Dit SDK DJPK. Pembahasan pertemuan ini sebagai berikut:

- a. Dummy E-Logbook sudah jadi dan sedang diuji cobakan;
- b. Menggunakan satellite based pergeserannya maksimal 5 meter;
- c. Bagian Export permit menjadi tidak wajib karena ekspor dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, jika sebelum itu maka belum bisa;
- d. MMSI belum otomatis harus diisi manual, ada opsi untuk auto look up;
- e. Untuk memudahkan pengoperasian, maka diusulkan untuk menambahkan opsi remember password;
- f. untuk penomoran trip diusulkan: RAL_Kapal_Trip ke.... atau RAL_NIB_Kapal_Trip ke... atau menggunakan MMSI;
- g. Verifikasi pengawasan bisa dilakukan dari VMS yang disandingkan dengan trajectory AIS harus in line dengan titik yang dimasukkan ke aplikasi e-logbook;
- h. Diusulkan untuk ada juknis agar dapat diumumkan sebelum pengambilan dimulai;
- i. AIS kapal jangan dimatikan dan MMSI harus selalu dipakai, data historical MMSI yang sudah pernah ada dapat dipelajari;
- j. Jika sudah ada KKPRL maka sudah otomatis tercantum titiknya di semua aplikasi pemetaan KKP;
- k. CCTV di kapal diperlukan untuk mengawasi muatan dalam kapal dan pergerakan pipa pengisap;
- l. Menambahkan kolom untuk pengisian, yaitu kolom kode Billing PNPB dan kolom upload Bukti bayar baru konfirmasi;
- m. Menambahkan kuota dan palka penuh serta sisa;
- n. Template report perlu didraft kan dulu untuk menjadi tampilan hasil keluaran aplikasi;
- o. Tidak perlu ada form registrasi di awal, nanti verifikasi yang input registrasi setelah mengirimkan surat resmi utk penyampaian email
- p. Kustom email body/notifikasi akan dilakukan oleh tim SDK
- q. Input SLO diganti Optional, ditaruh paling bawah
- r. Edit collection: kunci location agar tidak bisa edit
- s. Audit trail edit
- t. Tambahan tampilan map yang menyandingkan data input lokasi dan trajectory kapal

- u. Pengawasan dilakukan utk pengambilan karena harus sesuai dengan KKPRL, kl untuk penempatan bisa hingga 2 km menggunakan selang
- v. Penambahan kewajiban menggunakan cctv di juknis agar mempermudah utk barang bukti jika ada indikasi pelanggaran
- w. Dibutuhkan fitur reporting, template report akan disiapkan oleh tim SDK
- x. Tim developer akan menyiapkan cloud untuk demo aplikasi agar mudah diakses Bersama.



Gambar 5. Pembahasan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) yang masuk;
2. Melakukan pembahasan lanjutan konsep Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
3. Melakukan Pembahasan lanjutan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

3.1.6. IKK 6 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/ atau ekonomi yang berada di dasar laut yang perlu dipelajari agar kita dapat memahami dan belajar tentang masa lampau mengenai jalur pelayaran, perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kapal dan kenavigasian serta kebudayaan masyarakat di masa lampau sebagai salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan lokasi atau titik koordinat bangkai kapal tenggelam dan/atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan BMKT untuk dikelola secara baik. Setelah kawasan atau lokasi BMKT teridentifikasi, dilakukan penilaian komprehensif untuk menentukan

strategi kebijakan pengelolaan terbaik dan secara berkelanjutan.

Kawasan BMKT yang dikelola secara spesifik merujuk pada lokasi atau titik koordinat ditemukannya bangkai kapal maupun muatannya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Identifikasi titik-titik koordinat ini memastikan bahwa setiap temuan berada dalam pengawasan yang tepat. Dengan identifikasi dan pemetaan yang akurat, aset-aset bawah air tersebut dapat diarahkan menjadi sumber daya kelautan yang dikelola secara baik demi kepentingan negara maupun kesejahteraan masyarakat luas.

Setelah kawasan atau lokasi BMKT berhasil teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian komprehensif untuk mencari potensi yang ada di dalamnya. Penilaian mendalam ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan pemanfaatan BMKT secara insitu maupun . Melalui proses evaluasi yang matang, kebijakan yang diambil diharapkan dapat menjamin pengelolaan BMKT yang efisien dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Teknik Menghitung:

Jumlah kawasan BMKT yang dilakukan identifikasi melalui survei dan penilaian potensi pemanfaatan BMKT

Tabel 8. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan							
IKK - 6	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1	-	-	-	-	-	1 Kawasan	3 kawasan	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Capaian indikator kinerja kegiatan Kawasan BMKT yang dikelola pada Triwulan I tahun 2026 belum ada capaian dari target 1 kawasan BMKT yang dikelola.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Triwulan I Tahun 2025 masih sama, yaitu belum ada capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kawasan BMKT yang dikelola Triwulan I Tahun 2026 terhadap Capaian Renstra DJPK Tahun 2029 yaitu sebesar 33,3% dengan target Renstra DJPK Tahun 2029 sebesar 3 Kawasan.

D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan kegiatan adalah tercapainya target sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 yaitu 1 kawasan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dikelola.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan BMKT Adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Kendala lainnya adalah kurang sinkronnya regulasi dan hambatan implementasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan BMKT.

Untuk mengatasi kendala pengelolaan BMKT, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menjalin kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 4) Kegiatan Pendukung
- a) Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Sumber daya Kelautan, Direktur Warisan Budaya Kemenbud, Timja BMKT, dan Biro Hukum KKP beserta perwakilan Eselon I lain Ingkup KKP untuk meminta masukan dan saran rekonstruksi Perpres 8 tahun 2023. Revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan kurang sinkronnya regulasi, hambatan implementasi, serta dinamika di lapangan terkait pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Terbitnya PP 28 Tahun 2025 mengubah skema perizinan pengangkatan BMKT dengan menghapus klasifikasi ODCB dan non-ODCB, sehingga membuka peluang penerbitan izin secara langsung melalui mekanisme perizinan berusaha. Perubahan ini menuntut penyesuaian norma dalam Perpres 8 Tahun 2023 agar selaras dan menghindari konflik regulasi.

Selain itu Perpres 8/2023 belum efektif diimplementasikan, antara lain karena adanya praktik penerbitan Surat Keterangan oleh Kementerian Kebudayaan yang memperpanjang proses dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, target PNPB sesuai PP 85 Tahun 2021 belum optimal dan menjadi temuan BPK, sehingga diperlukan penataan ulang regulasi agar lebih operasional dan akuntabel. Perpres 8/2023 juga belum efektif akibat praktik penerbitan surat keterangan yang memperlambat proses, sehingga target PNPB belum optimal dan menjadi temuan BPK. Selain itu, masih terjadi pengangkatan BMKT ilegal pada 2023, sehingga diperlukan revisi untuk memperkuat tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan penegakan hukum.



Gambar 6. Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023

b) Penjajakan Kerja Sama Galeri BMKT dengan Galeri Indonesia Kaya

Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya kelautan yang memiliki nilai historis, budaya, ilmiah, dan edukatif. Pemanfaatan BMKT tidak hanya ditujukan untuk kepentingan konservasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dan penguatan identitas maritim bangsa.

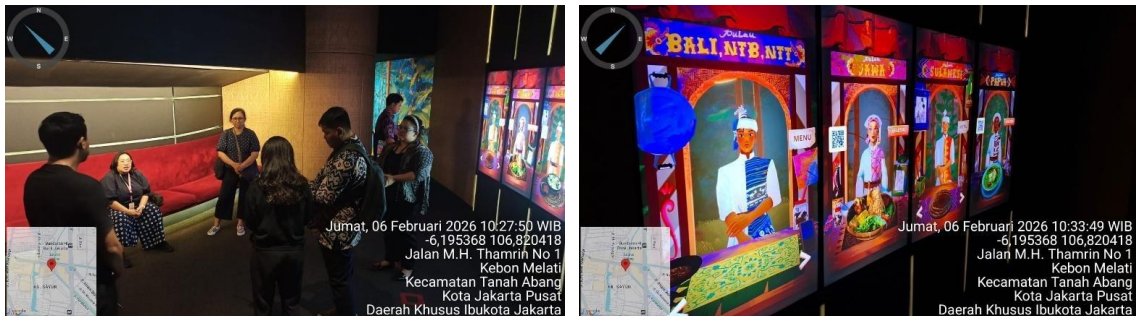
Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki peran dalam mendorong pemanfaatan BMKT secara bertanggung jawab melalui berbagai bentuk kerja sama, salah satunya dalam penyajian informasi dan pameran kepada masyarakat. Galeri BMKT berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memerlukan penguatan konsep dan jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sumber Daya Kelautan melaksanakan penjajakan kerja sama dengan Galeri Indonesia Kaya guna membahas potensi kolaborasi dalam penyelenggaraan pameran, kurasi konten, serta kegiatan edukasi yang berkaitan dengan BMKT. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembangan pemanfaatan BMKT yang lebih luas dan berdampak.

Kegiatan penjajakan kerja sama antara Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Galeri Indonesia Kaya membahas peluang kolaborasi pemanfaatan Galeri BMKT. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Galeri Indonesia Kaya menyambut baik rencana kerja sama dengan Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam pemanfaatan Galeri BMKT;
2. Adanya potensi penyelenggaraan pameran tematik BMKT yang menampilkan nilai sejarah, budaya, dan edukasi secara digital;
3. Pertukaran informasi mengenai konsep kurasi, tata pameran, serta metode penyajian konten yang interaktif dan menarik bagi pengunjung;

4. Disepakati perlunya penyusunan konsep kerja sama secara lebih rinci sebagai dasar tindak lanjut.



Gambar 7. Penjajakan Kerja Sama Galeri BMKT dengan Galeri Indonesia Kaya

c) Pertemuan Identifikasi Lanjutan dan Penjajakan Kerja Sama Identifikasi BMKT dengan BRIN

Pertemuan dihadiri oleh Tim kerja BMKT Direktorat Sumber daya Kelautan, Ira Dienia, Aryaandini Novita, dan Ofri Johan dari BRIN, perwakilan dari Pusat Pelatihan KP, perwakilan PSDKP, dan perwakilan Dinas KPKP. Pertemuan membahas hasil Identifikasi BMKT di Pulau Untung Jawa pada tahun 2025, pada identifikasi awal menunjukkan adanya temuan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang cukup komprehensif di dekat Pulau Nyamuk dan Pulau Untung Jawa pada kedalaman 22,6 hingga 24 meter. Berdasarkan survei menggunakan *Side Scan Sonar* dan *Sub Bottom Profiler*, ditemukan objek berupa tumpukan mangkok dan piring yang tersebar di area seluas 20 x 15 meter dengan ketinggian mencapai 1,8 meter, tertutup lumpur dan sedimentasi tinggi. Selain itu, terdeteksi struktur kapal berbahan logam yang masih relatif utuh dan telah menjadi habitat biota laut seperti karang lunak (*Gorgonia*), ikan lepu (*Lionfish*), serta organisme penempel lainnya. Kondisi situs yang berada di jalur lalu lintas kapal yang ramai menjadikannya rentan terhadap gangguan, terutama karena banyaknya jaring nelayan yang tersangkut di lokasi tersebut.

Para ahli dari BRIN dan Pusat Pelatihan KP menekankan pentingnya identifikasi mendalam terkait asal-usul, periode masa, serta estimasi tahun pembuatan kapal dan artefak tersebut melalui metode fotogrametri dan analisis arkeologi maritim. Terdapat indikasi bahwa salah satu bangkai kapal merupakan kapal modern dari era 1990-an, namun kapal berbahan besi lainnya berpotensi berasal dari abad ke-18 yang memiliki nilai sejarah tinggi. Dari sisi konservasi dan pengawasan, lokasi ini memiliki potensi besar untuk ditetapkan sebagai kawasan dampak konservasi atau destinasi wisata selam (*dive center*), namun diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta peran aktif Pokmaswas dalam menjaga keamanan situs dari potensi penjarahan atau

kerusakan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan kolaborasi strategis antara KKP, BRIN, dan Dinas KPKP melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan riset mendalam di bawah



Gambar 8. Pertemuan Identifikasi Lanjutan dan Penjajakan Kerja Sama Identifikasi BMKT dengan BRIN

program "Rumah Program" atau RIM. Langkah konkret yang segera diambil meliputi pengiriman surat permohonan bantuan penelitian ke BRIN serta koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Perhubungan dan BPK wilayah Serang untuk pemetaan situs yang lebih akurat. Pihak PSDKP juga akan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat di tahun 2026, sembari menunggu hasil kajian teknis yang akan menentukan apakah BMKT tersebut akan tetap dikelola di tempat (*in-situ*) melalui program ekonomi biru atau dilakukan pengangkatan untuk penyelamatan nilai sejarah.

- d) Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
 - a) Pembentukan Tim PAK Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
 - b) Kerjasama pendataan BMKT Cileungsi antara KKP dengan Universitas Flinders
 - c) Kuliah Umum dan Hibah BMKT ke Universitas Seni Indonesia

3.1.7. IKK 7 Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Wilayah perairan Indonesia yang tergolong dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) menjadi habitat bagi ribuan spesies biota laut, mulai dari mikroorganisme, invertebrata, hingga flora dan fauna laut yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan bioaktif.

Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutraseutikal, dan kosmetik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari spons laut, alga, bakteri laut, dan biota lainnya memiliki aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, antiinflamasi, dan imunomodulator.

Pasar ekspor produk kelautan cukup besar yang ditunjang dengan potensi sumber daya hayati yang cukup melimpah. Hal ini dapat mendukung industri biofarmakologi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan, mulai dari pangan alternatif, kosmetik, suplemen, obat, hingga rekayasa energi ramah lingkungan untuk biofuel. Selama ini Indonesia lebih banyak mengeksport produk biofarmakologi dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi dan mengimpornya kembali ketika sudah menjadi barang jadi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk biofarmakologi antara lain standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian UMKM, bahan baku dari laut relatif lebih mahal dibanding dengan terestrial, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk, akses permodalan, dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sehingga pasarnya terbatas.

Dalam konteks kelautan, biofarmakologi berfokus pada organisme laut sebagai sumber senyawa bioaktif. Organisme laut, seperti alga, spons, bakteri laut, teripang, karang lunak, dan plankton, menghasilkan berbagai molekul kimia unik untuk bertahan hidup. Molekul inilah yang disebut senyawa bioaktif laut, senyawa yang memiliki kemampuan biologis tertentu, misalnya menghambat bakteri, meredakan radang, membunuh sel kanker, atau melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif.

Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang ada di laut atau perairan umum, termasuk biota air laut, air payau, dan air tawar sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi obat, suplemen kesehatan, kosmetik, atau bahan industri medis. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi

Tabel 9. Capaian IKK Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan							
IKK - 7	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1	-	-	-	-	-	1 unit bisnis	2 unit bisnis	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2025.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
- Keberhasilan
- Telah dilakukan peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolah produk biofarmakologi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Kendala ‘
- Target jumlah peserta sebanyak 100 orang namun karena terjadi efisiensi anggaran sehingga capaiannya hanya 20 orang.
- Solusi
- Menunggu anggaran tambahan dari PNPB agar **target dapat tercapai**.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung IKK yang telah dilaksanakan pada Triwulan I, antara lain:
1. Bimbingan teknis pengolahan produk berbahan albumin ikan gabus
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 bertempat di Rumah Gizi Kabupaten Cirebon. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam memanfaatkan ikan gabus menjadi pangan fungsional yang bernilai ekonomi. Peserta bimtek antara lain anggota rumah gizi Cirebon, anggota Koperasi Fortuna 59 Striata, dan perwakilan tokoh masyarakat setempat. Narasumber dan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: (1) Ibu Yanti Amperawati (Praktisi Gizi) memberikan materi tentang praktek pembuatan pangan fungsional berbahan ikan gabus, (2) Ketua Koperasi Fortuna 59 Striata memberikan materi tentang Pengolahan Ikan Gabus Menjadi Albumin dan Manfaatnya untuk Kesehatan, dan (3) Katimja Biofarmakologi memberikan materi tentang Pengembangan Produk Biofarmakologi untuk Kesehatan dan Kecantikan.



Gambar 9. Bimbingan teknis pengolahan produk berbahan albumin ikan gabus

H.Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- a) Verifikasi data untuk penyusunan Informasi Geospasial Biofarmakologi
- b) Audiensi terkait pemetaan sumber daya kelautan guna mendukung pengembangan biofuel

3.1.8. IKK 8 Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannyaberdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan

Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut.

Teknik Menghitung:

% Penyelesaian Perizinan: $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.
- Jumlah permohonan perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA : Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau PTSA KKP

Tabel 10. Capaian IKK Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)

SK-6	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan							
IKK - 8	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan target capaiannya Tahunan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 belum ada disebabkan target capainnya tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 belum ada disebabkan target capainnya tahunan

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2026

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh asistensi dan audiensi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta percepatan proses perizinan oleh pelaku usaha. Kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain belum optimalnya kepastian pelaku usaha dalam mengajukan dan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha. Solusi/Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya meningkatkan intensitas asistensi, audiensi dan pendampingan secara terukur kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha baik melalui *hotline* dan asistensi secara daring dan luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

F. Kegiatan Pendukung

- 1) Melakukan asistensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan;
- 2) Melakukan audiensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
- 3) Melakukan pendampingan kepada pelaku

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Melakukan asistensi lebih intensif kepada pelaku usaha
- 2) Melakukan pendampingan tim pengawas sumber daya kelautan dalam melaksanakan monitoring terhadap izin yang sudah terbit

3.1.9. IKK 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja Dit. SDK (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Teknik Menghitung:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan
- A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan
- B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan

Tabel 11. Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
95,2	95,24	0,04	117,6	81	117,6	81%	84%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 95,24 dari target sebesar 81 atau sama dengan 117,6% capaian ini diperoleh berdasarkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang diselesaikan Tuntas pada aplikasi SIDAK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 0,04 %.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Perbandingan capaian triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan target renstra lebih tinggi sebesar 14,24 %.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

Tidka terdapat standar nasional/target nasional/target internasional.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawabnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

1. Rekonsiliasi SAKTI satker lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA-E1 Periode tahunan TA 2025 pada 12-15 Januari 2026
2. Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Satker lingkup DJPK pada 18 - 20 Februari 2026
3. Pemantauan Lanjutan Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen lingkup DJPK pada 25 – 27 Februari 2026
4. Pembahasan penetapan akun signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK pada 12-13 Maret 2026
5. Monitoring Lanjutan Penyelesaian dan Percepatan TL Pengawasam APIP dalam rangka Penilaian TL Pengawasan APIP TW 1 TA 2026 lingkup DJPK pada 31 Maret 2026

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

* Menyelesaikan rekomendasi yang masih belum tuntas

3.1.10. IKK 10 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern

Teknik Menghitung:

$$X_{penyelesaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- X penyelesaian : Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
 A : Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK
 B : Jumlah nilai temuan BPK

Tabel 12. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 10	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
100	-	-	-	-	-	100%	100%	-

- Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan tercapainya indikator ini didukung oleh komitmen seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan. Analisis keberhasilan lainnya juga didukung oleh koordinasi dengan Tim Inspektorat I sebagai Mitra Direktorat Pengelolaan Kelautan terkait dokumen yang harus disiapkan.
- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

1. Percepatan penyelesaian penyusunan dokumen kerugian negara PDTT PDLN TA 2023-2025 pada 9-11 Maret 2026.

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Menindaklanjuti seluruh temuan atas rekomendasi BPK
2. Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
3. Koordinasi dengan penanggungjawab untuk penyelesaian rekomendasi

3.1.11. IKK 11 Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Teknik Menghitung:

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Berikut predikat nilai SAKIP:

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:

$$PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$$

Dimana,

$Perenc_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%)

$Penguk_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%)

$Pelap_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%)

$Eval_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%)

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 13. Capaian IKK Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 11	Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
80,95	-	-	-	-	-	72	78	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan tercapainya IKU PM SAKIP ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- H. Kegiatan Pendukung
 1. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPK Tahun 2026 (14 - 15 Januari 2026)
 2. Pembahasan *Modeling Artificial Intelligence* (AI) lingkup DJPK (20 Januari 2026)
 3. Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2026 lingkup DJPK (21 Januari 2026)
 4. Pembahasan Manual Indikator DJPK Tahun 2026 (23 Januari 2026)
 5. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Langkah Strategis Belanja K/L pada TA 2026 lingkup DJPK (24 Februari 2026)
 6. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Proses Pembukaan Blokir Anggaran lingkup DJPK TA 2026 (27 Februari 2026)
 7. Rapat Pimpinan Lingkup DJPK : Evaluasi dan Pembahasan Rencana Kerja Bulan

Maret (2 Maret 2026)

8. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja tahun 2026 lingkup DJPK (5-6Maret 2026) dan (10-11 Maret 2026)

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPK Triwulan I Tahun 2026
2. Verifikasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
3. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
4. Persiapan data AKIP dan PM SAKIP di lingkup DJPK.

3.1.12. IKK 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)

Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 4) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026

Teknik Menghitung:

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

A_1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A_2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A_3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026

A_4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026

Tabel 14. Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit. SDK)	
IKK - 12	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	
Tahun 2025	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	1	100%	4 Dokumen	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026 sesuai dengan target dokumen.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2025, sebanyak satu dokumen.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
IKK ini tidak terdapat dalam renstra sehingga capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 tidak bisa dibandingkan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 pencapaian IKU ini melibatkan seluruh ASN dan Non ASN lingkup DJPK dengan didukung oleh sarana dan prasana yang memadai dalam kegiatan SPIP.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- G. Kegiatan Pendukung
Penyusunan Manajemen Risiko atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK pada 4 - 6 Maret 2026.
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
1. Menyusun laporan SPIP pada periode berikutnya
2. Melakukan pemantauan MR dan kegiatan tahun 2026

3.1.13. IKM 13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Teknik Menghitung:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
 - SLTA Sederajat; dan
 - Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DI /	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keperawatan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :
 - Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- ✓ Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan

- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN
- Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
- Calon PNS (CPNS);
 - Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - Dipekerjakan (DPK); dan
 - Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 15. Capaian IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 13	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
85,83	-	-	-	-	-	81	84	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target semesteran sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :
1. Keaktifan seluruh pegawai di lingkup Ditjen PK dalam hal peningkatan kompetensi.
 2. Sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin. serta keaktifan seluruh pegawai lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dalam mengikuti peningkatan kompetensi dan juga melakukan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai melalui riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1. Penyusunan SKP pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
 - 2. Pelaporan LHKPN dan LHKASN
 - 3. Monitoring absensi pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
 - 4. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi pegawai lingkup Ditjen PK
 - 5. Pengisian SKP Tahun 2025
 - 6. Penilaian SKP tahun 2025
 - 7. Pengusulan kenaikan pangkat periode TW I
 - 8. Penyampaian usulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
 - 1. Penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja BKN triwulan I tahun 2026.
 - 2. Penilaian umpan balik 360^o aplikasi portal pegawai KKP.
 - 3. Layanan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan .
 - 4. Monitoring presensi pegawai triwulan I tahun 2026 lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
 - 5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan

3.14. IKM 14. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
- 2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:
 - 1) Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
 - 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Teknik Menghitung:

Nilai pengawasan kearsipan internal merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
- Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:
- Sumber Daya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.}$$

$$b_1 = \text{Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25\%}$$

$$A_1 = \text{Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.}$$

$$\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan}$$

$$b_2 = \text{Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50\%}$$

$$A_2 = \text{Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.}$$

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
A	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A		
A	Memuaskan	>80 – 90
B	Sangat Baik	>70 – 80
B		
B	Baik	>60 – 70
C	Cukup	>50 – 60
C		
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 16. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 14	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
94	-	-	-	-	-	81	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 5 komponen indikator dalam aspek penilaian SAQ Monev KIP oleh tim penilai internal KKP diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana dan prasarana, kelembagaan, digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Menghadiri Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada 20 Januari 2026 di Wisma Gracillaria

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk penyesuaian OTK UPT 3 Es 1 masih proses SIASN yang baru, setelah itu

Dokumen Pembahasan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis



korespondensi menyesuaikan

Gambar 10. Dokumen Pembahasan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

- 2) Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Menindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesi Nomor B/BA.01.00/2/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Informasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026 sehingga Setiap Eselon Masing Masing mengusulkan mansoskul

Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan



Gambar 11. Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan

- 3) Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip serta memperkuat integrasi data kearsipan nasional, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan SIKN dan JIKN pada tanggal 11 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pengelola arsip di instansi pemerintah mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi kearsipan berbasis digital.

Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi pengelola arsip dalam penggunaan SIKN dan JIKN
2. Menstandarkan proses input, pengolahan, dan publikasi arsip digital.
3. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam jaringan informasi kearsipan nasional
4. Mendukung keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola arsip nasional berbasis digital. Dengan meningkatnya kapasitas pengelola arsip, diharapkan SIKN dan JIKN dapat berfungsi optimal sebagai sarana integrasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi kearsipan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN



Gambar 12. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN

- 4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun

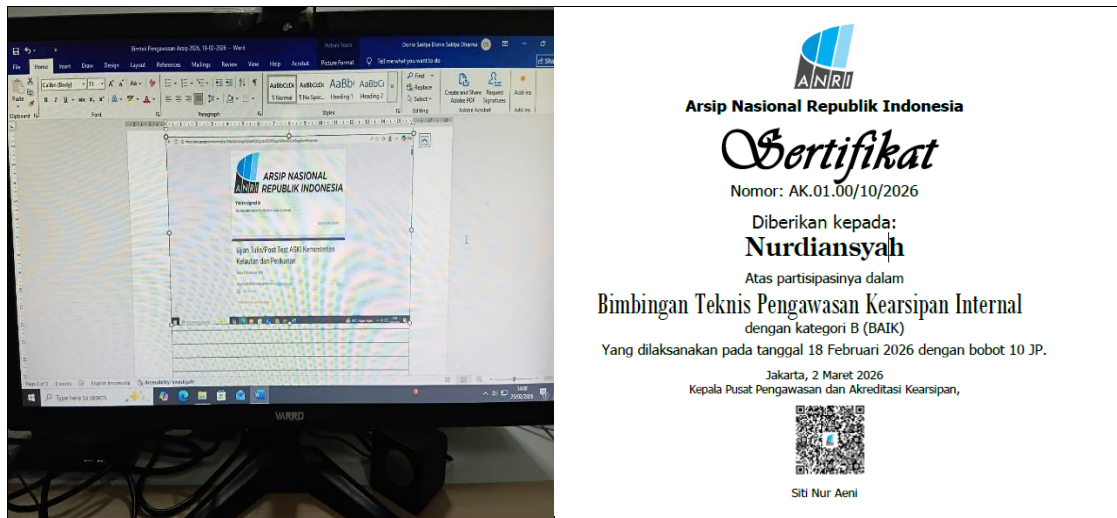
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026 dilaksanakan pada 18 Februari 2026. Narasumber dari Anri, Pengawasan kearsipan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah. Untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kompetensi sekaligus forum berbagi pengalaman antar pengelola arsip.

Tujuan

- Memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan standar pengawasan kearsipan.
- Melatih aparatur dalam menyusun instrumen pengawasan kearsipan.
- Meningkatkan keterampilan analisis hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Mendorong terciptanya budaya tertib arsip di seluruh instansi pemerintah.
- Menjadi Tim Pengawasan Harus Bersertifikat dari ANRI serta berkompeten

Kegiatan Bimtek Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola arsip. Dengan penguasaan instrumen dan teknik pengawasan, diharapkan setiap instansi mampu menjaga tertib arsip, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bersertifikat dari ANRI.





Gambar 13. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026

- 5). Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal untuk pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dihadiri peserta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Bagian Umum pada Unit Kearsipan II, serta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Kearsipan II.

Pengawasan kearsipan internal merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan tertib arsip, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Persiapan pengawasan dilakukan untuk menilai kesiapan unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan arsip, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat efektivitas tata kelola arsip.

Tujuan

- Menyusun rencana kerja pengawasan kearsipan internal tahun 2026.
- Menyiapkan instrumen pengawasan sesuai standar ANRI.
- Mengidentifikasi unit kerja prioritas yang akan diawasi.
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam rangka tertib arsip.
- Menjamin kesiapan data dan dokumen pendukung sebelum pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan Persiapan

Koordinasi Awal: Rapat internal untuk menentukan ruang lingkup pengawasan.

Penyusunan Instrumen: Menyusun checklist pengawasan kearsipan sesuai standar ANRI.

Inventarisasi Arsip: Mengidentifikasi arsip aktif, inaktif, dan vital di setiap unit kerja.

Sosialisasi: Memberikan arahan kepada unit kerja terkait persiapan dokumen.

Simulasi Pengawasan: Uji coba instrumen pengawasan pada satu unit kerja sebagai pilot project.

Hasil Persiapan

- Instrumen pengawasan kearsipan internal telah disusun dan disepakati.
- Unit kerja telah menerima arahan dan daftar dokumen yang harus disiapkan.
- Pilot project simulasi pengawasan menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek pencatatan arsip elektronik.
- Jadwal pengawasan internal ditetapkan untuk periode Maret s.d Juni 2026.

Jadwal Pengawasan Kearsipan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2026

No	Uraian	Waktu
1	Penilaian Mandiri	17 Maret s.d 28 April 2026
2	Penyampaian from ASKE dan data dukung ke ANRI	29 April s.d 30 April 2026
3	Klasifikasi on desk exit meeting pengawasan kearsipan eksternal	19 Maret s.d 10 Juni 2026
4	Verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal	6 Juli s.d 20 Juli 2026
5	Penyampaian data dukung tambahan eksternal	Maksimal 31 Juli 2026

5. Senin, 6 April 2026

6). Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026
Hasil Pengawasan Tahun 2025 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sebesar 96,23 (sembilan puluh enam koma dua puluh tiga) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 95,23 (sembilan puluh lima koma dua puluh tiga) kategori “AA (sangat memuaskan)

Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 sebesar 94,91 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh Sembilan) kategori “A (memuaskan)

Catatan Tim Pengawas ANRI

Kinerja yang harus DIPERTAHANKAN:

- Kebijakan kearsipan yang sebagian besar telah ditetapkan dan disosialisasikan terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya
- Pembinaan kearsipan yang diwujudkan dengan kapabilitas unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip vital
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah, penyampaian LAKI Konsolidasi, dan pemberian penghargaan kearsipan terhadap SDM dan unit pengolah
- Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pengendalian dan pengelolaan arsip inaktif dari seluruh unit pengolah, pemusnahan arsip sesuai prosedur dan rutin dilakukan

Catatan Tim Pengawas ANRI

- Penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dengan memuat materi terkait penyelenggaraan SIKN-JIKN
- Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) baik untuk internal maupun eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan alih media arsip sesuai ketentuan yang berlaku
- Penyelamatan arsip Covid-19 melalui penyerahan ke ANRI
- Sertifikasi serta peningkatan kompetensi arsiparis
- Pemenuhan kompetensi bagi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan

pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan

Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026

1. Jadwal Pengawasan : 11 bulan (Januari-November) meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan
2. Objek Pengawasan : seluruh unit Kearsipan (UK) II dan unit pengolah (UP) di Lingkungan KKP

Time Line Pengawasan Kearsipan Tahun 2026

- Self Assessment (17 Maret s.d. 28 April 2026)
- Penyampaian Form ASKE dan Data Dukung ke ANRI (29 s.d. 30 April 2026)
- Klarifikasi on desk dan exit meeting (19 Mei s.d. 10 Juni 2026)
- Verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal (6 s.d. 20 Juli 2026)

Time Line Pengawasan Kearsipan Tahun 2026

- PKPKT (6 April 2026)
- Self Assesment UK (April 2026)
- Self Assesment UP (Mei - Juni 2026)
- Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen UK (April 2026)
- Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen UK (Juni 2026)
- Pleno (Juli 2026)
- Penyusunan LAKI Konsolidasi (Juli s.d Agustus 2026)
- Penyampaian LAKI Konsolidasi kepada ANRI

KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL (OLEH ANRI KEPADA KKP)

Berdasarkan Form ASKE, bahan yang berasal dari aktifitas internal antara lain :

- Tata Naskah Dinas
- Penggunaan Kode Klasifikasi, Pemberkasan Arsip
- Pelaporan daftar arsip aktif
- Daftar arsip vital • Alih media arsip
- Pengelolaan SIKN/JIKN
- SDM yang mengelola arsip

e) Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- Untuk TW II akan fokus pada percepatan pemindahan arsip inaktif dan penyusutan arsip sesuai JRA.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp.10.798.232.840 atau sebesar 0,88% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.222.454.370.000,- (setelah revisi)

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 terdapat 14 Indikator Kinerja (IKK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja Direktorat Sumberdaya memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2026 adalah sebesar **110,55% (Istimewa)**. Dari 14 indikator kinerja tersebut ada 2 IKK yang memiliki target indikator kinerja pada triwulan I 2026, 1 IKK telah melampaui target, dan 1 indikator kinerja telah mencapai target dengan baik. Rincian capaian ditampilkan dalam tabel berikut. .

Tabel 17. Capaian kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan Tahun 2026

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULAN MARET

TAHUN
ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN
/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN
NKO 110.55%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%
SK.01	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam										
SK.07	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan						110,55			110,55	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan										
	Data Dukung1										
IKSK.07.09	-	Persen	Maximize	Rata-rata	81	81	95,24	117,58	81	95,24	117,58
IKSK.07.12	Laporan SPIP yang	Dokumen	Maximize		4	1	1	100	1	1	100

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frista Yorhanita**
Jabatan : Direktur Sumber Daya Kelautan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

Lampiran 1. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam	1.	Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	3
2.	Meningkatnya kompetensi petambak garam	2.	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	100
3.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	3.	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)	1.500
4.	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	4.	Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)	1
5.	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	5.	Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)	500
		6.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		7.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
6.	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	8.	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)	100
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit. SDK)	9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. SDK (%)	81
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. SDK (%)	100
		11.	Nilai PM SAKIP lingkup Dit. SDK (Nilai)	72
		12.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	4
		13.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)	81
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	81

Lampiran 1. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.201.500.000.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	1.300.000.000
Total Anggaran Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026		1.202.800.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

